

ABSTRAK

THE ROLE OF COURSE LEARNING IN INTEGRATING
DEMOCRACY VALUES

This research aimed to analyze and explain the role of learning PPKn in internalize the values of democracy in SMA Negeri 1 Ulubelu. The research method used in this research is qualitative descriptive with the subject of two PPKn teachers, five students are taken based on the grade level (low, medium, high) and vice principal of student field. Data collection techniques are using interview guides, observation guides, and documentation guidelines , while data analysis is using credibility test with triangulation. The results of this study showed that the learning of PPKn in the process of value transformation is to convey the values of democracy, value transaction is to create mutual relationship, internalization of value is to guide and direct the students. Learners can understand, understand and be able to act in accordance with the values internalized in his personality. The school supports with extracurricular activities that develop democratic values.

Keywords: *Democratic Values, Internalization, PPKn Learning*

ABSTRAK

PERANAN PEMBELAJARAN PPKn DALAM MENGINTERNALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI

Oleh :

Meri Sartika

Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan peranan pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian dua Guru PPKn, lima peserta didik diambil berdasarkan tingkatan nilai (rendah, sedang, tinggi) dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dalam proses transformasi nilai adalah menyampaikan nilai-nilai demokrasi, transaksi nilai adalah menciptakan hubungan timbal balik, internalisasi nilai adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik. Peserta didik dapat mengerti, memahami dan mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terinternalisasi dalam kepribadian dirinya. Pihak sekolah mendukung dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Kata kunci : *internalisasi, nilai-nilai demokrasi, pembelajaran PPKn*

Latar Belakang

Hakekat pendidikan sebagai upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat, bangsa dalam negara, secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan dengan dinamika perubahannya. Setiap negara manapun menginginkan negara dan bangsanya tetap berdiri tegak, mandiri, kuat sekaligus mampu memberi pengaruh bagi bangsa dan negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut berbagai upaya dilakukan dalam rangka pembangunan segala aspek, dan yang lebih utama pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berbagai program tentang pendidikan telah digulirkan seperti program Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Pendidikan Karakter, Gerakan Nasional Wajib Belajar Sembilan tahun dan lain-lain. Pola pendidikan di Indonesia telah di atur secara

sistematis dan terstruktur mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya terdapat tingkat program belajar yang terhimpun dalam mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran memiliki fokus dan tujuan tersendiri yang kesemuanya diarahkan pada upaya pencapaian tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan ke-hidupan bangsa dan secara khusus tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar men-jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber-akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mata pelajaran PPKn merupakan pendidikan yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang baru No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Ke-warganegaraan adalah mata pelajaran

yang secara umum bertujuan untuk me-ngembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan dimak-sudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan me-nanamkan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan.

Peranan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam rangka menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang

berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan Kewarganegaraan memben-tuk warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, me-nganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam hal ini mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mem-punyai misi pada penyiapan peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya semata-mata untuk pengetahuan (intelektual), melainkan realisasi sikap dan perilaku nyata sehari-hari sesuai dengan hakekat dan potensi diri masing-masing yang bersifat utuh. Sebagaimana yang diungkapkan Nursid Sumattmadja (2001:15) yang menjelaskan bahwa “ keutuhan

manusia itu bukan hanya pada sosok jasmaninya seperti makhluk hidup lainnya melainkan meliputi juga aspek akhlak, moral dan tanggung jawab sebagai khalifah dimuka bumi disinilah letak keterpaduan antara pendidikan intelektual dengan keterampilan dan pendidikan umum”.

Saat ini Pendidikan

Kewarganegaraan dikatakan sebagai pendidikan yang mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi.

Tuntutan akan hal demikian tidak salah karena secara teoritis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan Miriam Budiardjo tahun 1977 dalam (Winarno 2013:134), menurut *International Commission of Jurist* sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Demokrasi yang sebenarnya memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya, dimana masyarakat memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik, perlu praktik internalisasi melalui PKN. Internalisasi adalah sebuah proses menyatunya nilai dalam diri seseorang, merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, perilaku (tingkah laku), praktik dan aturan baku pada diri seseorang. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa pemahaman nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi pada sikap. Internalisasi ini akan bersifat permanen dalam diri seseorang.

Mengingat pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga Negara yang demokratis, maka peranan PPKn dalam mewujudkan tujuan tersebut sangatlah penting, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Peranan Pembelajaran PPKn dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMA

Negeri 1 Ulubelu Tanggamus Tahun Pelajaran 2017/2018”.

Tinjauan Pustaka

Pengertian PPKn

Dalam lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 dicantumkan bahwa “mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”. Proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarahkan pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia, yang menetapkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi Pembelajaran PPKn

Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PPKn sampai saat ini, maka arah baru PPKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif

dalam mencapai tujuannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai arah baru Dikti (2016) yaitu :

- a. PPKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara.
- b. PPKn mengembangkan daya nalar (*state of mind*) bagi para peserta didik. PPKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi.
- c. PPKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran.

d. kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui ”mengajar demokrasi” (*teaching democracy*), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*).

Tujuan Pembelajaran PPKn

Menurut John. J. Patrick konsep pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang efektif untuk mempersiapkan warganegara yang demokratis mencakup empat komponen dasar sebagai berikut (Bahmuller & Patrick, 1999) :

1. Pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan demokrasi. Komponen pertama ini mengajarkan konsep-konsep dan implementasi demokrasi yang mencakup konsep demokrasi (minimal), konstitusionalisme, hak-hak warganegara, kewarganegaraan, civil society (masyarakat madani) dan ekonomi pasar,
2. Keterampilan kognitif warganegara yang demokratis

(*cognitive skills*) yang ditujukan agar dapat memberdayakan warganegara supaya memiliki kemampuan mengidentifikasi, mendiskripsikan, menjelaskan informasi dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah publik dan menentukan dan mempertahankan keputusan tentang masalah-masalah tersebut.

3. Keterampilan partisipatori warga negara yang demokratis dimaksudkan untuk dapat memberdayakan warganegara agar mampu memengaruhi kebijakan dan keputusan publik dan memiliki tanggungjawab terhadap wakil-wakilnya di pemerintahan. Kombinasi keterampilan kognitif dan keterampilan partisipatori dapat dijadikan sarana bagi warganegara berpartisipasi secara efektif untuk memajukan kepentingan umum dan personal serta mempertahankan hak-hak mereka. Pengembangan keterampilan kognitif dan partisipatori membutuhkan agar siswa belajar secara intelektual di dalam maupun diluar kelas.

4. Kebaikan dan disposisi warganegara demokratis yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan disposisi terhadap demokrasi. Komponen ini menunjukkan sifat atau karakter yang diperlukan untuk mendukung dan mengembangkan demokrasi.

Pengertian Internalisasi

Secara etimologis internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kaidah Bahasa Indonesia akhiran-isasi mempunyai definisi proses. Sehingga internalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses. Dalam kamus besar bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai proses penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga menjadi keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Tahapan Internalisasi

Proses internalisasi dalam pembentukan sikap/ nilai berdasarkan hasil penelitian Winarno (2009) dalam Titik Sunarti,dkk

(2014:182) pada dasarnya mencakup tiga tahapan

- a) Tahap Transformasi Nilai, dimana dalam tahap ini pendidik sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa yang semata-mata komunikasi searah.
- b) Transaksi Nilai yakni suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik secara aktif. Dalam tahap ini pendidik tidak hanya memberikan informasi tentang nilai-nilai tetapi juga terlibat dalam proses menerima dan melaksanakan nilai-nilai itu, dan
- c) Tahap Internalisasi, pada tahap ini jauh lebih dalam yang juga melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi telah menyangkut sikap mental kepribadian baik bagi pendidik maupun peserta didiknya.

Teori Internalisasi

Psikoanalisa dan teori belajar sosial, menawarkan perspektif yang berbeda

tentang bagaimana seorang anak menjadi manusia yang bermoral atau memiliki nilai. Kedua teori ini menawarkan sebuah konsep internalisasi, yakni; “*the adoption of pre-existing, ready-made standards for right actions as one’s own*” (Berk, 1994) dalam Bunyamin Maftuh (2008) :

- a. Teori Psikoanalisa, sebagai seorang tokoh psikoanalisa Sigmund Freud meyakini bahwa anak-anak memperoleh nilai atau moralitas mereka langsung dari orang tuanya, dan mereka bertindak sejalan dengan resep-resep moral untuk menghindari perasaan bersalah.
- b. Teori belajar sosial (*social learning theory*) menyatakan, bahwa anak-anak memperoleh nilai atau perilaku bermoral melalui pencontohan dan penguatan (*reinforcement*). Pendukung teori ini mengakui, bahwa anak-anak mulai berperilaku dalam cara-cara yang konsisten dengan standar orang dewasa karena para orang tua dan guru menindaklanjuti “perilaku yang baik” dengan penguatan positif dalam bentuk

persetujuan, kasih sayang (afeksi), dan hadiah lainnya (Berk, 1994). Mereka meyakini bahwa anak-anak belajar untuk berperilaku moral secara luas melalui pencontohan (*modeling*), dengan mengamati dan meniru orang dewasa yang melakukan perilaku yang pantas.

Nilai-Nilai Demokrasi

Kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat, demokrasi dianggap sebagai *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan masyarakat mentransformasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan catatan tentu saja bahwa tidak setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Nilai-nilai demokrasi memang sangat menghargai martabat manusia,

namun pilihan apakah demokrasi liberal atau demokrasi yang lain ini tidak dapat lepas dari konteks masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto, et al. (2002) dalam Tukiran Tuniredja (2013:140-145) meliputi :

a. Kebebasan menyatakan pendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak sebagai warga Negara yang dijamin undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan untuk menyatakan pendapat senantiasa muncul dari setiap warga Negara dalam era pemerintahan terbuka saat ini.

b. Kebebasan berkelompok

Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga Negara. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari sebagai makhluk sosial. Demokrasi menjamin kebebasan warga negara untuk

berkelompok termasuk membentuk organisasi politik dan sebagainya.

c. Kebebasan berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada empat jenis partisipasi. *Pertama*, pemberian suara dalam pemilihan umum. *Kedua*, bentuk partisipasi dengan melakukan kontak/hubungan dengan pejabat pemerintah. *Ketiga*, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah dengan tidak untuk menciptakan gangguan bagi kehidupan politik. *Keempat*, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku.

d. Kesetaraan antarwarga

Kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi

setiap warga Negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah maupun agama.

e. Rasa percaya (*Trust*)

Rasa percaya antar satu sama lain baik antar warga, antar politisi maupun warga dan politisi merupakan nilai dasar lain yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Pemerintahan yang demokratis akan sulit terbentuk apabila rasa percaya satu sama lain tidak tumbuh. Dimulai dengan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri maka akan dapat menimbulkan kepercayaan pada orang lain.

f. Kerja sama

Kerja sama diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama dalam hal kebijakan, bukan dalam hal keburukan. Dalam sebuah kerja sama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu atau antarkelompok. Demokrasi tidak hanya me-

merlukan hubungan kerja sama antarindividu dan kelompok. Kompetisi, kompromi, dan kerja sama merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Peranan Pembelajaran PPKn dalam Meng-internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu Tanggamus Tahun Pelajaran 2017/2018.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara, obser-vasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi.

Hasil dan Kesimpulan

Proses internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn adalah kegiatan yang dilakukan pada pembelajaran PPKn dalam rangka menanamkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupan peserta didik sebagai bekal menjadi bagian penting dalam masyarakat. Nilai-nilai demokrasi tersebut akan tercermin dalam perilaku seseorang yang telah berhasil menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi.

Hasil wawancara peneliti terhadap delapan orang informan yang terdiri dari guru mata pelajaran PPKn, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan peserta didik serta dokumentasi dan observasi kemudian diolah sesuai dengan variabel penelitian. Ketiga teknik yang digunakan kemudian diolah dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diolah dan disesuaikan dengan variabel dalam disajikan dalam bentuk data deskriptif sebagai berikut :

1. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Transformasi Nilai-Nilai Demokrasi

Tahap transformasi ini sangat penting dalam mendukung proses selanjutnya. Pada bagian ini komunikasi yang terjalin dapat dikatakan searah karena guru sebagai penyampai materi dan informasi pada peserta didik. Sedangkan peserta didik masih berperan mendengarkan dan menghayati apa yang telah disampaikan oleh guru. Dalam hal ini guru berperan dalam menyampaikan tentang nilai-nilai demokrasi. Guru dapat menyampaikan hal ini baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran PPKn itu sendiri. Guru dapat mengatakan langsung muatan nilai-nilai tersebut maupun mencotohkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dalam melakukan tahap ini guru dikatakan sebagai pusat dalam pembelajaran, dimana guru menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Keberhasilan tahap ini erat kaitannya dengan keberhasilan guru dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini pada peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran PPKn, keduanya kurang lebih mengatakan hal yang sama. Mereka sangat mendukung

proses internalisasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran PPKn. Yang mem-bedakan pendapat guru PPKn tersebut menurut hasil pengamatan peneliti adalah bagaimana cara guru menyampaikan materi atau informasi pada peserta didik. Informan pertama lebih cenderung bersikap lembut dan santai, cara membentuk hubungan dengan peserta didik sebagai teman yang siap mendengarkan keluhan peserta didiknya. Sedangkan informan kedua memiliki cara yang lebih tegas kepada pada peserta didiknya, informan sangat tegas terhadap hal-hal yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas.

Keberhasilan tahap ini memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini apabila guru dapat menyampaikan dengan baik maka peserta didik akan merespon dengan baik apa yang guru berikan, sehingga dapat melanjutkannya pada tahap selanjutnya. Terbukti berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik yang diambil secara acak dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Ulubelu dapat dikatakan berjalan dengan baik serta berperan

dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didiknya dengan baik. Hasil dokumentasi yang didapat peneliti dari guru mata pelajaran PPKn menunjukkan bahwa hasil belajar yang diperoleh peserta didik cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan pada setiap kali pengambilan nilai. Nilai akhir pada ulangan semester ganjil pun menunjukkan keberhasilan guru dalam membantu peserta didik untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil pengamatan peneliti selama berada di lingkungan tempat penelitian, peneliti melihat bahwa peserta didik mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang dan lebih santai. Dari apayang tergambar ini setidaknya telah tercermin nilai-nilai demokrasi yaitu nilai kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kesetaraan antar peserta didik, saling percaya dan kerja sama.

2. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Transaksi Nilai-Nilai Demokrasi

Tahap transaksi merupakan tahap kedua setelah transformasi nilai, pada tahap ini komunikasi yang

terjalin adalah dua arah antara pendidik dan peserta didik yang bersifat interaksi timbal balik secara aktif. Dalam tahap ini pendidik tidak hanya memberikan informasi tentang nilai-nilai, tetapi juga terlibat dalam proses menerima dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu peran pendidik sebagai model melalui percontohan untuk berperilaku yang pantas dalam lingkungannya sangat penting dalam tahap ini, karena peserta didik lebih cenderung belajar dari apa yang dicontohkan kepadanya.

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti membenarkan informasi-informasi yang diperoleh dari informan. Kegiatan yang dilakukan mulai dari mendengarkan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan diluar jam pelajaran. Informan dapat merespon dengan baik apa yang disampaikan, kemudian mengolah dan memberi tanggapan terhadap hal yang baru diketahui. Maka interaksi antara guru dan peserta didik terbangun dengan baik sebagaimana yang diharapkan pada tahap transaksi nilai ini. Hubungan timbal balik ini

menunjukkan bahwa nilai-nilai yang disampaikan dapat diterima dan kemudian ditanamkan dalam kepribadian peserta didik di SMA Negeri 1 Ulubelu.

3. Peranan Pembelajaran PPKn dalam Internalisasi Nilai-Nilai Demokrasi

Tahap internalisasi merupakan tahap yang jauh lebih dalam melibatkan tidak hanya aspek fisik, tetapi telah menyangkut sikap mental kepribadian baik bagi pendidik maupun peserta didik. Ini merupakan tahap akhir dimana seseorang telah menemukan sebuah nilai yang baru. Proses ini berlangsung seiring dengan perkembangannya dan memerlukan bimbingan dari orang telah lebih dulu tahu dari pada seseorang yang baru akan menginternalisasikan nilai-nilai dalam dirinya sehingga menjadi kesatuan yang utuh dalam kepribadiannya yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara pada informan GrPKn, PD dan Waka dan pengamatan langsung di SMA Negeri 1 Ulubelu dapat disintesis bahwa dengan pembelajaran PPKn melalui kegiatan kulikuler, ko

kulikuler dan ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan lain sebagai penunjang yang dirancang sedemikian rupa guna menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Peranan pembelajaran PPKn cukup baik dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi untuk menyiapkan peserta didik sebagai warga Negara yang demokratis dalam masyarakat. Serta selaku informan kedelapan informan sepakat mengatakannya bahwa pembelajaran PPKn sangat berperan dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik.

Hasil triangulasi teknik dalam penelitian menunjukkan bahwa peranan pembelajaran PPKn dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi di SMA Negeri 1 Ulubelu Tahun Pelajaran 2017/2018 cukup baik, berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut tercapai atas kepercayaan dan kerja sama yang baik antara guru dan peserta didik. Guru berperan dalam menyampaikan, mendidik dan membimbing kepada hal-hal yang baik

serta partisipasi peserta didik dalam mendengarkan, merespon sampai menginternalisasi nilai-nilai tersebut pada kepribadiannya. Peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn berperan dengan baik dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi guna mengembangkan potensi diri peserta didik sebagai bagian dari warga masyarakat. Melalui kegiatan pembelajaran PPKn peserta didik diberikan pengetahuan, diarahkan dan dibimbing serta dibentuk keterampilan ber-kewarganegaraan.

Setiap guru mempunyai cara tersendiri untuk bersama peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Ulubelu guru menggunakan cara membentuk hubungan yang lebih santai pada peserta didik, melibatkan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan pokok bahasan karena peserta didik disana lebih cenderung lebih aktif dan tertarik pada hal yang baru untuk diketahui. Guru akan lebih memperhatikan peserta didik yang cenderung lambat dalam menerima sesuatu yang baru. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta

didik yang kurang baik maka dilakukan metode pembelajaran teman sebaya. Agar seluruh peserta didik dapat lulus dengan baik.

Saran

Setelah peneliti menyelesaikan, mem-bahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti ingin

memberi saran kepada:

- a. Bagi guru mata pelajaran PPKn dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik hendaknya agar lebih kreatif dalam menciptakan suasana kelas yang demokratis agar peserta didik dapat belajar dengan aktif dan terbiasa berada dalam lingkungan yang aktif dan demokratis.
- b. Bagi peserta didik dalam proses pembelajaran hendaknya agar lebih serius dan konsentrasi agar dapat mendengarkan dengan baik dan mengahayati apa yang telah dipelajari.
- c. Bagi pihak sekolah dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah hendaknya menyiapkan sarana dan prasarana untuk memudahkan jalannya pembelajaran di kelas. Serta menyiapkan kegiatan-kegiatan

yang positif bagi per-kembangan peserta didik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan : Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Jakarta :Sinar Grafika
- Titik, Sunarti, dkk. 2014. *Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SMP Dalam Perspektif Fenomenologis (Studi Kasus Di SMP 2 Bantul)*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi. Vol.2 No.2, 2014

Maftuh, Bunyamin. 2008.
Internalisasi

Nilai-Nilai Pancasila Dan

Nasionalisme Melalui
Pendidikan

Kewarganegaraan, Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. II

No. 2 Juli 2008.

Taniredja, Tukiran. 2013. *Konsep*

Dasar Pendidikan

Kewarganegaraan. Yogyakarta :

Penerbit Ombak

Zamroni. 2013. *Pendidikan*
Demokrasi pada Masyarakat
Multikultur.

Yogyakarta: Penerbit Ombak